

## Kader Nasyyiatul Aisyiyah Harus Berani Mengisi Ruang Kosong di Ranah Publik

Jum'at, 06-07-2012

**Bandar Lampung-** Ranah kebijakan publik seringkali diabaikan dan dikesampingkan dalam pencapaian program masa depan sebuah organisasi. Padahal kebijakan publik merupakan kebijakan yang mengikat dan berdampak luas dan langsung dalam kehidupan berbangsa dan negara. Untuk itu Nasyyiatul Aisyiyah (NA) melalui kadernya, Nasyyiatul Aisyiyah harus berani mengisi ruang-ruang tersebut. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Rita Pranawati, Ketua IV Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah

Sebelum mengisi kekosongan ini, Nasyyiah harus mempersiapkan diri secara matang dan menengok ke belakang terlebih dahulu. Jangan sampai lokomotif Nasyyiatul Aisyiyah tidak dapat diikuti oleh gerbongnya. Beberapa hal yang dilakukan.

Pertama, melakukan revitalisasi struktur. Tanpa struktur yang kuat, Nasyyiatul Aisyiyah tidak mungkin mampu berhadapan dengan perubahan sosial. Struktur yang sekarang sudah cukup baik, terutama jika dibanding dengan organisasi lain sejenis, akan tetapi kenyataan ini tidak boleh menjadikan cukup berpuas diri. Struktur yang kuat ini akan menjadi gerak Nasyyiatul Aisyiyah lebih mudah dan lincah sehingga kedepan NA akan menjadi *leader* gerakan perempuan.

Kedua, struktur yang kuat tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa adanya human resource yang mumpuni. Untuk mencapai ini diperlukan upaya pemberdayaan yang cukup masif terhadap kader, baik dipusat maupun di daerah. Bahwa jangan sampai hanya kader ditingkatkan elit yang terberdayakan. Bentuknya pun tidak lagi tradisional dalam model nominal dan instrumental, tetapi juga benar dalam model empowerment.

Ketiga, advokasi. Nasyyiah harus bercermin dulu ke dalam sebelum keluar. Cermin ini adalah upaya sadar bahwa jangan sampai melakukan upaya pemberdayaan, tetapi abai dengan kondisi internal.

Ketiga hal tersebut adalah bagian integral dimana tanpa ini gerak langkah Nasyyiah akan pincang. Selanjutnya jika hendak berfikir kebangsaan, dipastikan Nasyyiatul Aisyiyah tidak akan lagi canggung.

Isu-isu yang berkaitan dengan MDGs adalah isu-isu yang bisa menjadi ruang publik yang bisa menjadi ladang Nasyyiah dalam dakwah. "Meski MDGs adalah program yang didesakkan oleh lembaga donor dan negara maju untuk kepentingannya, MDGs sendiri sesungguhnya tidak ada yang bertentangan dengan

tujuan Nasyah, karena itu bisa diselaraskan. Tanpa MDGs pun Nasyah akan melakukan hal tersebut," jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Erni Zuhriati, Ketua II yang membidangi dakwah menyampaikan bahwa upaya internal adalah upaya pematangan kader. "Pematangan kader bukan saja untuk Nasyah atau Muhammadiyah sendiri, tetapi juga untuk menyiapkan kader bangsa, ungkap Erni. Hal tersebut juga menjadi inti dari pembukaan pidato ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kemarin di GSG Unila yang menyatakan bahwa ibu adalah madrasah, yang secara khusus ditujukan kepada NA karena kader Nasyah umumnya terdiri dari kader putri yang sudah cukup dewasa dan ibu-ibu muda. Tambahnya.

Untuk memantapkan gerakan, Nasyah juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain, dan juga berpartner dengan Pemuda Persatuan Islam (Persis) dan Fatayat Nahdhatul Ulama (NU). Sinergi ini dilakukan karena NA tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Progresifitas ini setidaknya setara dengan gerakan NA periode awal.